

TESIS

KEDUDUKAN DAN KONSEKUENSI HUKUM NOTARIS YANG MERANGKAP JABATAN SEBAGAI ADVOKAT DALAM PRESPEKTIF UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS



**Muhammad Erwan Amrullah
NIM. 2320216310011**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
BANJARMASIN
2026**

**KEDUDUKAN DAN KONSEKUENSI HUKUM NOTARIS YANG
MERANGKAP JABATAN SEBAGAI ADVOKAT DALAM
PRESPEKTIF UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS**

Tesis

Untuk memperoleh gelar Magister Dalam

Program Magister Kenotariatan

Pada Fakultas Hukum niversitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

**Muhammad Erwan Amrullah, S.H
2320216310011**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM PROGRAM MAGISTER
KENOTARIATAN BANJARMASIN**

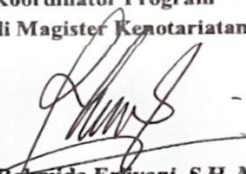
Tesis ini
Telah diperbaiki dan
Disetujui Pada Tanggal.....

PEMBIMBING



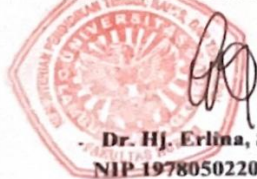
Dr. H. Rachmadi Usman. S.H., M.H
NIP 19670914 199303 1 003

Diketahui oleh
Koordinator Program
Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Rahmida Ernyani, S.H., M.H
NIP 19730420 200312 2002

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H
NIP 19780502200112 2002

Tesis ini Telah di Pertahankan di depan
Sidang Panitia Penguji
Pada Tanggal.....

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr.Mulyani Zuleha, S.H., M.H
Sekertaris : Dr. H. Ahmad Syaufi , S.H., M.H
Anggota/Pembimbing :Dr. H. Rachmadi Usman S.H., M.H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Erwan Amrullah
NIM : 2320216310011
Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat Banjarmasin
Tesis : Kedudukan dan Konsekuensi Hukum Notaris Yang Merangkap Jabatan
Sebagai Advokat dalam Prespektif Undang-Undang Jabatan Notaris

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis yang saya buat ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari unsur plagiatisme
2. Pada penulisan Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik disuatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 06 Januari 2026

Yang membuat pernyataan


Muhammad Erwan Amrullah, S.H



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM**

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

diberikan kepada :

**Muhammad Erwan Amrullah
NIM 2320216310011**

**MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Judul Tesis :

**KEDUDUKAN DAN KONSEKUENSI HUKUM NOTARIS YANG MERANGKAP JABATAN
SEBAGAI ADVOKAT DALAM PRESPEKTIF UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS**

Telah dideteksi tingkat plagiasinya sebesar : 12%
sesuai dengan kriteria teloransi $\leq 20\%$ dan dinyatakan bebas plagiasi

Banjarmasin, 16 Juli 2026



*Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum ULM*

**Dr. H. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 2005011 002**

**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

RINGKASAN

KEDUDUKAN DAN KONSEKUENSI HUKUM NOTARIS YANG MERANGKAP JABATAN SEBAGAI ADVOKAT DALAM PRESPEKTIF UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS

Muhammad Erwan Amrullah¹, Rachmadi Usman²,

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 116 halaman

Kata Kunci: Advokat, Rangkap Jabatan, Cuti Jabatan, Konsekuensi Hukum

Larangan rangkap jabatan notaris sebagai advokat merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum kenotariatan yang bertujuan menjaga independensi, netralitas, dan integritas notaris sebagai pejabat umum. Ketentuan ini secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Namun, dalam praktik masih ditemukan notaris yang tetap menjalankan profesi advokat, termasuk selama masa cuti jabatan notaris, sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait kedudukan notaris, konsekuensi hukum, serta penerapan larangan rangkap jabatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum terhadap notaris yang tetap menjalankan profesi advokat selama masa cuti jabatannya serta menilai penerapan ketentuan hukum larangan rangkap jabatan notaris sebagai advokat dalam praktik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masa cuti jabatan tidak menghapus status hukum notaris sebagai pejabat umum, sehingga seluruh kewajiban dan larangan jabatan, termasuk larangan rangkap jabatan sebagai advokat, tetap berlaku. Notaris yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi administratif dan etik, serta berpotensi menimbulkan tanggung jawab perdata dan implikasi pidana dalam kondisi tertentu. Selain itu, penerapan larangan rangkap jabatan dalam praktik belum sepenuhnya efektif akibat lemahnya pengawasan, adanya kekosongan norma terkait masa cuti jabatan, serta budaya hukum yang masih permisif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, mekanisme pengawasan yang lebih tegas, dan konsistensi penegakan sanksi guna menjamin kepastian hukum dan menjaga martabat profesi notaris.

Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan larangan rangkap jabatan notaris sebagai advokat dalam praktik belum berjalan secara efektif. Ketidakefektifan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya kekosongan norma terkait pengaturan larangan rangkap jabatan selama masa cuti, lemahnya pengawasan dan koordinasi antara Majelis Pengawas Notaris dan organisasi profesi advokat, serta budaya hukum yang masih permisif terhadap praktik rangkap jabatan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, merusak integritas profesi notaris, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap akta otentik.

¹ NIM : 2320216310011

² Pembimbing

Berdasarkan temuan tersebut, tesis ini menyimpulkan bahwa larangan rangkap jabatan notaris sebagai advokat merupakan ketentuan fundamental yang harus ditegakkan secara konsisten untuk menjaga kepastian hukum, keadilan, dan etika profesi. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan pengaturan hukum yang menegaskan berlakunya larangan rangkap jabatan selama masa cuti, penguatan mekanisme pengawasan, serta peningkatan kesadaran etika profesi guna menjamin profesionalisme dan martabat jabatan notaris.

KEDUDUKAN DAN KONSEKUENSI HUKUM NOTARIS YANG MERANGKAP JABATAN SEBAGAI ADVOKAT DALAM PRESPEKTIF UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS

Muhammad Erwan Amrullah³, Rachmadi Usman⁴,

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 116 halaman

ABSTRAK

Kata Kunci: Advokat, Rangkap Jabatan, Cuti Jabatan, Konsekuensi Hukum

Larangan rangkap jabatan notaris sebagai advokat merupakan ketentuan hukum yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga independensi, netralitas, serta integritas notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Namun, dalam praktik masih ditemukan notaris yang tetap menjalankan profesi advokat, termasuk selama masa cuti jabatan, sehingga menimbulkan persoalan hukum mengenai kedudukan notaris, konsekuensi hukum, dan penerapan larangan rangkap jabatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum terhadap notaris yang tetap menjalankan profesi advokat selama masa cuti jabatannya serta menilai penerapan ketentuan hukum larangan rangkap jabatan notaris sebagai advokat dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masa cuti jabatan tidak menghapus status hukum seseorang sebagai notaris, sehingga larangan rangkap jabatan tetap berlaku. Notaris yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi administratif dan etik, serta berpotensi menimbulkan tanggung jawab perdata dan implikasi pidana dalam kondisi tertentu. Selain itu, penerapan larangan rangkap jabatan dalam praktik masih belum efektif karena lemahnya pengawasan, kekosongan norma terkait masa cuti, dan budaya hukum yang permisif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pengawasan, dan penegakan sanksi guna menjamin kepastian hukum dan menjaga martabat profesi notaris.

³ NIM : 2320216310011

⁴ Pembimbing

**LEGAL STATUS AND LEGAL CONSEQUENCES OF NOTARIES HOLDING DUAL
POSITIONS AS ADVOCATES FROM THE PERSPECTIVE OF
THE NOTARY POSITION ACT**

Muhammad Erwan Amrullah⁵, Rachmadi Usman⁶,
Master of Notary Program, Lambung Mangkurat University, 116 page

ABSTRACT

Keyword; Notary, Advocates, Dual Positions, Official Leave, Legal Consequences

Prohibition for dual positions of Notaries as Advocates is legal norm which strictly regulated in Act Number 2 of 2014 concerning Notary Position and Act Number 18 of 2003 concerning Advocates. This provision is intended in order to keep the independence, neutrality, and integrity of the Notaries as public official who are authorized to make authentic deeds. However, in practice it is still found that Notaries who are still practicing profession as advocates, including during the official leave, this has caused legal problems on the position of the Notaries, legal consequence, and enforcement of the said prohibition of dual position. This research is aimed at analyzing legal consequence on the Notaries who are still performing the profession as Advocates during official leave and evaluating the enforcement of the legal provision on the prohibition of dual position of the Notaries and Advocates in practice. Method applied in this research is normative legal research using statute approach and conceptual approach, and the primary and secondary legal resources are analyzed prescriptively. The results of the research indicate that the period of official leave does not eliminate the somebody's legal status as a Notary, so the prohibition of dual positions is still applicable. Notaries who violate the said provision can be imposed administrative and ethical sanctions, and there is a potential to arise civil liability and criminal implication in particular condition. Besides, enforcement of the prohibition of dual positions in practice is not yet effective because of weak supervision, vacuum of norms related to period of leave, and permissive legal culture. Therefore, strengthening of regulation, supervision, and enforcement of sanction in order to guarantee legal certainty and safeguard the dignity of Notary profession.

Translated by,

Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., W.Div
Authorized Sworn Translator



⁵ Student Number : 2320216310011

⁶ Supervisor

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan Rahmat, taufik, dan hidayahNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini, walaupun penulis sadar bahwa dalam tesis ini masih jauh dari kata sempurna, selanjutnya shalawat dan salam kepada Nabi dan Rosul Muhammad SAW sebagai contoh tauladan dalam kehidupan manusia. Karya ilmiah tesis yang sederhana ini telah selesai dan dipersembahkan bagi orang-orang yang saya cintai dan sayangi:

1. Ayahanda dan ibunda, Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, saya persembahkan kepada ayah dan bunda saya Sanggu dan Jemi'ah, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik saya sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang salehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat saya balas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada orantua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga Ayahanda dan Ibunda selalu mendapatkan lindungannya, Dihaturkan sembah sujud untuk Ayah dan Ibu berdua;
2. Kakak-Kakak, atas bantuan, dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Doa kalian sangat dibutuhkan, semoga segala hal baik selalu menyertai dan istri saya yang menemani pada saat bimbingan dari awal sampai akhir terima kasih.

3. Dosen pembimbing dan Penguji Tesis, Bapak Dr. H. Rachmadi Usman. S.H., M.H dan Ibu Dr.Mulyani Zuleha, S.H.,M.H dan atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas kasih, anugerah dan berkatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, yang berjudul:

KEDUDUKAN DAN KONSEKUENSI HUKUM NOTARIS YANG MERANGKAP JABATAN SEBAGAI ADVOKAT DALAM PRESPEKTIF UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS,

sebagai tugas akhir dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Selanjutnya dengan seluruh kerendahan hati terhatur segala penghargaan dan salam terima kasih yang sangat tulus kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan selama ini:

1. 1. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
2. Bapak Dr. Saprudin, S.H. LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan sebagai sekretaris penguji yang telah memberikan masukan, saran dan koreksi atas penulisan tesis ini;
3. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
4. Ibu Dr.Mulyani Zuleha, S.H.,M.H Selaku Ketua Penguji yang memberikan masukan, saran, dan koreksi atas penulisan tesis ini;
5. Bapak Dr. H. Rachmadi Usman. S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing dan memberikan dorongan selama proses penyelesaian tesis ini;
6. Seluruh Dosen Pengasuh mata kuliah Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
7. Segenap Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Keuangan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
8. Orang Tua terkasih, segenap keluarga tercinta, rekan-rekan dan para

sahabat yang senantiasa dan Istri saya tercinta memberikan bantuan dan dorongan semangat yang tiada henti hingga dapat menyelesaikan studi ini.

Banjarmasin, 06 Januari 2026



Muhammad Erwan Amrullah, S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	iv
RINGKASAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PERSEMBAHAN.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I. Latar belakang.....	1
II. Rumusan Masalah.....	25
III. Keaslian Penelitian.....	25
IV. Tujuan dan Kegunaan.....	27
V. Tinjauan Pustaka.....	29
VI. Metode Penelitian.....	30
VII. Sistematika dan Penulisan.....	33
BAB II BAGAIMANA KONSEKUENSI HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG TETAP MENJALANKAN PROFESI ADVOKAT SELAMA MASA CUTI JABATAN SEBAGAI NOTARIS.....	34
I. Pengertian dan Peran Profesi Notaris.....	34
II. Perbandingan Profesi Notaris dan Advokat.....	43
III. Konsekuensi Hukum atas Pelanggaran Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Advokat.....	50
IV. Teori Hukum yang Relevan.....	68
BAB III Penerapan Ketentuan Hukum Larangan Rangkap Jabatan Notaris	

sebagai Advokat dalam Praktik.....	74
BAB IV PENUTUP.....	98
I. KESIMPULAN.....	98
II. SARAN.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	10

